

	News Title : Bappebti Menata Perdagangan Kripto	
	Media Name : Neraca	Journalist : gro
	Publish Date : 18 March 2022	Tonality : Positive
	News Page : 10	News Value : 27,675,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 9,225,000
	Section/Rubrication : Industri Perdagangan	Topic : kripto

Bappebti Menata Perdagangan Kripto

NERACA

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selalu memonitor dan mengelola perkembangan aset digital yang berkembang di Indonesia, khususnya aset kripto.

Berdasarkan catatan Bappebti, total transaksi aset kripto di Indonesia saat ini mencapai Rp 859,4 Triliun dengan 11,2 juta pelanggan terdaftar pada 2021. Pesatnya pertumbuhan dan besarnya nilai transaksi kripto memerlukan pengaturan dan pengawasan agar masyarakat tetap terlindungi dari praktek ilegal yang merugikan.

Oleh karena itu, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021 yang mengatur tentang perdagangan aset kripto.

"Kementerian Perdagangan juga telah mengatur perlindungan bagi pelanggan aset kripto, yang meliputi kewajiban memiliki tanda daftar bagi calon pedagang aset kripto, kewajiban pelaporan secara periodik, kewajiban menjelaskan risiko transaksi, dan penetapan jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan," papar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Lebih lanjut, Bappebti juga mempeketat pengawasan perdagangan aset kripto. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.

Sebelumnya, Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana pun menegaskan, bahwa setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap je-

nis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

"Aset Kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian," tegas Wisnu.

Apalagi, Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga Pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. "Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut," ujar Wisnu.

Terkait dengan aset kripto Indonesia buatan anak bangsa, pada prinsipnya Wisnu melihat sebagai hal positif. Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku, aset kripto buatan dalam negeri dapat diperdagangkan.

Bappebti melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah. Potensi dan inovasi yang dimiliki anak bangsa serta potensi pasar di Indonesia sangat besar dan terus bertumbuh. Dalam beberapa tahun ini, beberapa Aset Kripto buatan anak bangsa sudah dipasarkan di beberapa pasar global, dan adayang sudah terdaftar dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020.

Sehingga dalam hal ini Wisnu menghimbau masyarakat bisa memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto.

"Masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti dan dipastikan diperdagangkan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti," himbau Wisnu.

Sikap tegas yang dilakukan Kemendag ini adalah untuk melindungi masyarakat. Diantaranya, setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, selama tahun 2021, Kemendag memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. "Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan," tegas Wisnu.

Seperti diketahui, sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. @gro